

**PERUBAHAN RELASI GENDER DAN SEKSUALITAS DALAM PROSTITUSI: KAJIAN FEMINISME BARAT DAN FEMINISME PASCAKOLONIAL**

*Jurnal Analisa Sosiologi*  
Januari 2023, 12 (1): 134-155

**Rahesli Humsona<sup>1</sup>, Sri Yuliani<sup>2</sup>**

**Abstract**

*The relationship between gender and sexuality in the prostitution industry has changed along with the development of information and communication technology. The purpose of this study was to determine the relation changes in particular between prostitutes, users, pimps and brokers. The perspectives used are western feminism and postcolonial feminism. The study used a qualitative method with a phenomenological approach. Sampling using purposive technique, data collection by observation, in-depth interviews and FGD. For the validity of the data, triangulation of sources and methods is used, while the data analysis uses an interactive model with components of data reduction, data display and conclusion drawing. The results of the study indicate that changes in gender relations and sexuality in the prostitution can be seen from the ability of women to control relations with men in production (earning income) which can be understood by Western feminism theory. Meanwhile, the inability of women can be seen in the consumption relationship (allocating income) which can be understood by Postcolonial feminism theory. Therefore, the theory of Western feminism and Postcolonial feminism does not need to be contradicted but is used according to the changing aspects of gender relations and sexuality in prostitution.*

**Keywords:** *The Changed Of Relationship, Gender And Sexuality, Prostitution.*

**Abstrak**

Relasi gender dan seksualitas dalam industri prostitusi mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan relasi khususnya antara pelacur, pengguna, germo dan calo. Perspektif yang digunakan adalah feminisme barat dan feminisme pascakolonial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposif, pengambilan data dengan observasi, wawancara mendalam dan FGD. Untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode, sedang analisis data menggunakan model interaktif dengan komponen reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan relasi gender dan seksualitas dalam prostitusi nampak dari kemampuan perempuan untuk mengendalikan relasi dengan laki-laki dalam produksi (memperoleh pendapatan) yang dapat dipahami dengan teori feminisme barat. Sedang ketidakmampuan perempuan nampak dalam relasi berkonsumsi (mengalokasikan pendapatan) yang dapat dipahami dengan teori feminisme

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret

<sup>1</sup>Email korespondensi: rahesli64@staff.uns.c.id

pascakolonial. Oleh karena itu teori feminisme Barat dan feminisme pascakolonial tidak perlu dipertentangkan melainkan dimanfaatkan sesuai dengan aspek perubahan relasi gender dan seksualitas dalam prostitusi.

**Kata Kunci: Perubahan Relasi, Gender Dan Seksulitas, Prostitusi.**

## **PENDAHULUAN**

Dalam sejarah perkembangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan gender telah menciptakan hubungan yang tidak adil, menindas, serta mendominasi antara kedua jenis kelamin tersebut. Manifestasi ketidakadilan gender yang dapat muncul dalam bentuk kekerasan kerja terhadap perempuan, salah satunya adalah prostitusi. Prostitusi atau pelacuran merupakan suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan (Fakih, 1998).

Pelacuran merupakan profesi yang setua peradaban manusia. Pelacur dari zaman dahulu hingga saat ini kebanyakan menjalankan prakteknya secara terselubung, karena profesi pelacur merupakan aib dan melanggar norma sosial dan agama. Kebanyakan perempuan terjun ke dunia prostitusi karena keterpaksaan demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Perempuan yang menjadi pelacur karena keterpaksaan, baik karena dorongan ekonomi maupun korban *trafficking*, memiliki posisi tawar yang rendah dalam relasinya dengan pengguna sehingga rentan menjadi korban kekerasan seksual. Studi yang dilakukan Schulze (2014) mendapatkan bahwa perempuan yang menjadi pelacur karena terpaksa atau dipaksa berada pada posisi tanpa daya karena ketiadaan sumberdaya ekonomi. Relasi kuasa yang timpang ini berdampak pada kuasa tak terbatas laki-laki pengguna atas tubuh dan seksualitas perempuan pelacur.

Namun yang menarik, perubahan sosial yang terjadi akibat perubahan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga membawa perubahan dalam hal relasi, peran dan motif para aktor dalam prostitusi. Motif ekonomi tidak lagi menjadi faktor utama yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Arivia (dalam Patnani, 1999) menemukan fenomena menarik dalam aktivitas prostitusi yaitu banyaknya anak-anak remaja yang berprofesi sebagai pekerja seks demi memenuhi gaya hidup konsumtif. Keinginan

untuk menikmati hidup mewah tanpa harus bekerja keras telah mendorong perempuan remaja rela menjual tubuh dan seksualitasnya.

Bisa dikatakan bahwa pelacuran merupakan profesi yang paling mudah dimasuki perempuan karena hanya cukup bermodalkan tubuh dan seksualitas yang dimiliki. Semakin menarik tampilan fisik seorang perempuan semakin besar imbalan finansial dan material yang bisa didapatkan. Karena itu Edlund dan Korn (dalam Nanik, 2012) menyebutkan bahwa prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan yang memiliki ketrampilan rendah untuk mendapatkan gaji yang tinggi.

Perempuan yang memutuskan melanjutkan menjadi pelacur semata-mata untuk memenuhi gaya hidup mewah dan hasrat bersenang-senang lebih mempunyai posisi tawar di hadapan pengguna. Banyak tipe ini yang berasal dari kelompok yang secara standard umum dikategorikan mapan secara ekonomi. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelacur dari kalangan artis. Menurut penulis buku *Jakarta Undercover*, Moammad Emka (Kartika dalam megapolitan.kompas.com, 2015) dalam dunia prostitusi artis terdapat kelas-kelas. Artis kelas A adalah artis yang benar-benar berpredikat public figure. Mereka biasanya tidak akan sembarangan menerima pesanan pelanggan, apalagi dengan *booking short time*. Biasanya artis papan atas yang terlibat prostitusi akan meminta dijadikan simpanan atau dikawin kontrak atau dinikahi siri.

Gejala di negara industri maju yang relatif liberal adalah adanya tuntutan agar pelacuran dilegalkan sebagaimana profesi lainnya. Para pelacur dan para feminis liberal menuntut negara memberi perlakuan sama, baik perempuan maupun laki-laki, yang bekerja sebagai pelacur agar hak-haknya sebagai pekerja dapat dipenuhi dan mendapat perlindungan hukum. Dengan legalisasi prostitusi, pelacur dapat melakukan negosiasi dagang yang menguntungkan baginya, sehingga dapat mengambil keuntungan ekonomi optimal dari pekerjaan ini. New Zealand adalah negara yang telah melegalisasi prostitusi sejak tahun 2003. Pada tahun 2010, seorang polisi dipidana karena terbukti memaksa seorang pelacur untuk memberikan jasanya secara gratis. Kasus lainnya, di tahun 2014, seorang pelacur mendapatkan ganti rugi senilai 21.000 NZD (sekitar Rp 200 juta) dari badan

usaha prostitusi tempat ia bekerja yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Tampak bahwa legalisasi prostitusi menempatkan prostitusi sebagai sebuah usaha jasa yang setara dengan usaha jasa lainnya (Irlanie, 2016). Mesti secara umum prostitusi dipandang sebagai jenis profesi yang merendahkan martabat perempuan, namun tak bisa dipungkiri bahwa bisnis seksualitas – pelacuran, pornografi dan bisnis ikutannya – memberi sumbangan pendapatan yang besar pada negara. Bisa dipahami para pelacur menuntut negara memberi perlindungan hukum pada profesi mereka sebagai imbalan dari kontribusi pajak yang telah mereka sumbangkan pada negara.

Seiring perkembangan teknologi, prostitusi konvensional juga berkembang di dunia maya. Dalam masyarakat informasi (*information society*) saat ini, prostitusi online juga membentuk relasi baru dari para pelaku yang terlibat di dalamnya (Flora, 2022). Media-media online yang digunakan dalam praktik prostitusi online adalah whatsapp, messenger, facebook, dan lain-lain (Efendi & Apriliani, 2021; Puspita, 2015). Dengan media sosial, praktik prostitusi online dapat melibatkan banyak pihak di masyarakat termasuk artis seperti diungkap media massa (Tamarol, 2019). Faktor internal penyebab terjadinya prostitusi online yaitu berupa faktor kebutuhan ekonomi keluarga. Sedang faktor eksternal adalah pergaulan pertemanan, menghindari pelacakan petugas keamanan (Royani & Ningtias, 2021), dan kemudahan untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak tapi cepat sehingga dapat menunjukkan gaya hidup yang lebih bersih dan lebih halus (Sparks, 2019). Prostitusi online terus berkembang karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas.

Beberapa kota di Indonesia berkembang pesat dengan pusat-pusat prostitusi legal dan ilegal. Beberapa lokalisasi prostitusi ditutup, dibarengi berkembangnya lokasi baru yang sulit dideteksi. Bahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah lokalisasi terbanyak di dunia dengan 40 ribuan orang pekerja (Wahab, 2020). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perubahan relasi gender dan seksualitas dalam industri prostitusi di era digital. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji relasi khususnya antara pelacur, pengguna, germo dan calo dengan menggunakan teori feminis Barat dan feminis pascakolonial.

Beberapa kota di Indonesia berkembang pesat dengan pusat-pusat prostitusi legal dan ilegal. Beberapa lokalisasi prostitusi ditutup, dibarengi berkembangnya lokasi baru yang sulit dideteksi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perubahan relasi gender dan seksualitas dalam industri prostitusi di era digital, khususnya antara pelacur, pengguna, germo dan calo dengan menggunakan teori feminis Barat dan feminis postkolonial.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan tuntas. Dengan strategi fenomenologi peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu. Peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sedemikian rupa untuk memahami apa dan bagaimana suatu pengertian dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposif untuk mendapatkan informan dari prostitut atau pelacur, calo, germo, pengguna, pegawai Bapermas PPA & KB serta Yayasan Kakak Kota Surakarta. Tabel status dan peran informan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Status dan Peran Informan dalam Prostitusi**

No	Inisial	Status	Peran
1	Pa	Prostitut	Memberi layanan seksual pada pengguna
2	Pb	Prostitut	Memberi layanan seksual pada pengguna
3	Pc	Prostitut	Memberi layanan seksual pada pengguna
4	Ka	Pengguna	Konsumen layanan seksual

5	Kb	Pengguna	Konsumen layanan seksual
6	Ca	Calo	Memberi informasi adanya prostitut
7	Cb	Calo	Memberi informasi adanya prostitut
8	Ga	Germo	Pengasuh, pemilik prostitut dan perantara
9	Gb	Germo	Pengasuh, pemilik prostitut dan perantara
10	SS	LSM Kakak	Pendamping prostitut anak
11	Rn	Bapermas	Pelayan terpadu bagi perempuan dan anak
12	Ma	Ketua RT	Melayani warga
13	Ms	Warga	Mengamati fenomena sekitar

Pengambilan data dengan observasi, wawancara mendalam dan FGD. Data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yakni dari prostitut, calo, germo, pengguna, RT dan warga masyarakat. Sedang data sekunder diperoleh dari Bapermas PP PA & KB dan LSM Yayasan Kakak. Bapermas sebagai Koordinator Umum di PTPAS (Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Surakarta). Sementara Yayasan Kakak melakukan upaya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Pengambilan data primer diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) (Krueger, 1994, Irwanto, 2006). Data sekunder dengan menggunakan teknik dokumen. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi sumber dan metode (Moleong, 1995). Analisis data dilakukan dengan model analisis

interaktif yang memiliki tiga komponen yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Analisis juga dilakukan bersama-sama informan yang terlibat dalam pengumpulan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Prostitusi Konvensional**

Dalam prostitusi konvensional bukan berarti prostitut tidak berkembang Keberanian mulai muncul selaras dengan bertambahnya usia, untuk sebisa mungkin memilih pengguna yang tampan dan bersih. Kalau yang didapat kurang tampan, maka lebih senang kalau ternyata tidak rewel dan cepat menyelesaikan aktivitas seksualnya. Jadi di sini pengguna maupun pelacur memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pasangan seksual yang disukai. Informan prostitut yang beranjak dewasa, yang pernah dijadikan hadiah dalam suatu kompetisi geng motor menceritakan pengalamannya:

“Aku punya kenalan geng-geng motor yang suka pake. Tapi aku lihat dulu kayak apa mereka. Kalau terlalu brutal aku nggak mau. Pilih yang bersih dan duitnya banyak. Jadi kalopun semalam cuma sekali, tapi uangnya cukuplah.”

Pelacur yang beranjak dewasa dan masih berada di pusaran prostitusi, ada yang terlibat dalam pesta seks di rumah kontrakan dengan beberapa kamar. Mereka juga bisa memilih kelompok yang diminati. Tidak saja mereka dicari, tetapi bahkan berani mencari dan menghubungi kelompok pengguna. Mereka biasanya mengajak teman 2 sampai 3 orang. Mereka ikut bergabung di akhir pekan, dan berada di sana sampai pagi hari. Untuk keperluan makan dan minum dijamin oleh kelompok pengguna. Bila mereka merasa nyaman dan cocok maka akan berlanjut di minggu-minggu selanjutnya. Menurut pengguna, barangkali pemilik rumah kontrakan tahu aktivitas mereka, tetapi tidak pernah menegur. Yang penting kewajiban pembayaran lancar, maka tidak ada masalah.

Ada di antara pelacur muda yang pernah hamil dan digugurkan. Kasus seperti ini tidak bisa diatasi olehnya dengan menuntut tanggung jawab pengguna. Biasanya pengguna beralasan bahwa ia sudah membayar, serta

tidak ada kepastian bahwa itu akibat perbuatannya. Jika menghadapi kasus seperti ini, biasanya mereka tidak bisa mengatasi sehingga keluarganya terpaksa ikut menanggung akibatnya. Relasi seksual pranikah tetap lebih banyak menguntungkan laki-laki dibandingkan perempuan. Segala resiko yang muncul dari hubungan seksual seperti kehamilan tidak menjadi tanggung jawab pengguna.

### **Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas dalam Prostitusi Online**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan pelacur maupun pengguna dalam penelitian ini setuju bahwa berhubungan seksual di luar pernikahan adalah penyimpangan norma dalam masyarakat. Mereka juga ingin agar dapat menghentikan perbuatan tersebut. Jika saat ini belum berhasil, disebabkan oleh berbagai hal. Seorang informan pengguna yang bekerja sebagai pegawai pabrik mengatakan:

“Saya sebenarnya ingin berhenti, tetapi ceweknya malah menghubungi dan mengajak lagi. Biasanya menghubungi lewat WA atau *miss call*. Ya sudah saya mau saja. Saya hubungi balik dan kami gitu lagi. Saya malah tidak pernah menghubungi duluan, karena saya sebenarnya pengen berhenti.”

Bagi pelacur yang sudah beberapa tahun berada di pusaran prostitusi, mulai merasakan adanya tuntutan gaya hidup. Keinginan mendapatkan uang untuk memenuhi gaya hidup mendorong pelacur untuk terus menjalin relasi seksual komersial. Motif yang semula untuk tujuan ekonomi mengatasi kemiskinan telah bergeser. Seorang informan pelacur menceritakan alasannya:

“Saya pernah mikir untuk berhenti tetapi ya terus mau apa. Kalau butuh beli barang tidak ada uang. Tidak ada yang mau ngasih uang gratisan, enggak ada. Lagian kalau sudah terjun ya sekalian saja. Saya kontak orang yang sudah kenal, lewat medsos. Gampang itu. Kalau yang belum saya nggak berani. Apalagi kalau pasang foto untuk menawarkan diri, nggak pernah saya”.

Informan yang sudah berpengalaman bisa memilih pengguna yang akan dikontak. Mereka memilih pengguna yang berduit. Informan juga ada yang berani untuk menentukan tempat *speak* dan besarnya imbalan sebelum bertemu fisik. Biasanya mereka memilih tempat yang pernah digunakan, jadi tahu tingkat harga, kenyamanan dan kerahasiaannya. Sementara untuk



keepakatan makanan, minuman dan rokok, akan disepakati setelah mereka bertemu. Di sini pelacur juga berani ikut menentukan makanan dan minuman serta rokok yang akan dinikmati. Bagi pengguna berduit semua kebutuhan dibayar oleh pengguna. Informan mematok bayaran Rp 1 juta untuk 2 jam. Kalau ingin menambah biasanya bisa dibicarakan belakangan. Informan lain yang lebih berpengalaman ada yang memasang tarif Rp 2 juta untuk 2 jam. Jika melalui calo, maka besarnya pendapatan pelacur ditentukan oleh calo. Pada umumnya 50:50. Hubungan baik yang terjalin akan mempengaruhi keberlanjutan *speak* berikutnya.

Pelacur yang sudah tahu resiko berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan biasanya akan meminta pengguna untuk memanfaatkan kondom sebagai alat pengaman. Seorang informan mengatakan:

“Saya selalu minta pengguna pakai kondom. Saya berusaha seminimal mungkin tertular. Ya saya langsung mandi bersih kalau sudah pulang, tapi kan itu tidak menjamin. Pernah saya gatal-gatal langsung saja minum antibiotik biar gak parah. Kalau bisa saya milih orang yang bersih biar nggak ketularan.”

Informan tahu tentang cara mengatasi agar tidak tertular dari teman yang semula mengajaknya masuk prostitusi. Ia mengaku beli di apotek. Kalau gejalanya sudah hilang biasanya ia tidak minum antibiotik lagi.

Digitalisasi industri prostitusi telah merubah relasi gender dan seksualitas yang dibangun oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Digitalisasi menopang eksistensi prostitusi meski banyak lokalisasi ditutup. Digitalisasi menumbuhkan delokalisasi prostitusi. Delokasi meminjam dari konsep kimia yaitu suatu keadaan dimana electron tersebut tidak tetap posisinya pada 1 atom, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari 1 atom ke atom lain.

Dalam konteks prostitusi, delokalisasi merupakan gerak perpindahan lokasi setelah lokalisasi prostitusi dibubarkan, sehingga munculah kemudian delokalisasi prostitusi. Fenomena ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia pada tahun 2000an. Lokasi prostitusi menyebar tak beraturan ke wilayah sekitar yang dekat maupun jauh dari lokasi asal. Bila dikategorikan menurut tempatnya, maka bisa disebut: di pinggiran jalan, café, salon, panti pijat, rumah bordil, wartel, mal (pusat perbelanjaan) dan hotel. Masing-masing lokasi memiliki karakter yang berbeda dilihat dari status sosial

pelacur maupun pengguna (mereka juga biasa menggunakan istilah tamu atau pelanggan), serta berbagai tingkatan harga serta pelayanan yang diberikan. Mengacu paparan Heyl (1979) beberapa tipe pelacur yang telah lazim dikenal oleh masyarakat, dapat disusun dalam rentang tingkatan, antara lain adalah *streetwalkers*, *bar girls*, *studio models and escort*, *masseuses*, *hotel and conventional prostitutes*, *house prostitutes*, dan *call girls*.

Memasuki era digital dengan pemanfaatan internet, fenomena prostitusi terus bergerak. Ikatan yang semula kuat dan menentukan, terutama dengan germo dan calo (Humsona, 2010), terus melemah dan berganti dengan networking yang semakin bercabang banyak. Relasi yang terjalin makin pendek, sehingga pendapatan semakin besar. Tempat-tempat baru yang bermunculan dimanfaatkan untuk menjalin relasi seksual.

Tempat kos yang semula memiliki kontrol yang ketat dengan interaksi *face to face* semakin permisif dan asing satu sama lain. Media sosial membuat mereka yang dekat terasa jauh dan yang jauh terasa dekat. Ketidakpedulian antara satu dengan yang lain membuat rumah kos menjadi tempat yang nyaman untuk menjalin relasi seksual. Tempat kos tanpa induk semang atau penjaga menjadi tempat favorit karena memberikan kebebasan.

Rumah kontrakan juga menjadi pilihan bagi sekelompok remaja untuk mengadakan pesta seks. Sekelompok remaja mengaku datang dari beberapa kota di sekitar Surakarta, berkumpul di rumah kontrakan salah seorang teman. Mereka mengundang perempuan yang kadang masih usia Ayla untuk pelayanan seksual sesuai kesepakatan. Jika memuaskan bagi kedua pihak, maka kegiatan tersebut diagandakan secara rutin.

Warung internet (warnet) menjadi pilihan bagi pasangan komersial karena harganya murah dan aman. Warnet dengan bilik kecil-kecil yang dapat dikunci dari dalam sangat menarik karena komputer berfasilitas internet dapat dimanfaatkan untuk mengawali relasi seksual. Seringkali mereka adalah pasangan komersial yang sudah beberapa kali memanfaatkan fasilitas warnet yang berada tidak jauh dari lingkungan rumah kos. Seorang informan yang pernah bekerja sebagai penjaga warnet menuturkan:

“Saya pernah menjadi penjaga warnet yang buka 24 jam. Waktu itu saya masih mahasiswa. Saya tidak betah lama bekerja di situ karena risih. Kadang-kadang ada pelanggan yang sudah janji untuk ketemuan di warnet. Mereka kemudian melakukan hubungan di bilik itu. Lalu mereka biasanya keluar dari warnet bersamaan. Melihat gelagatnya sepertinya mereka tidak akrab. Saya belum pernah memergoki secara langsung, tetapi bilik yang mereka pakai meninggalkan bekas yang tidak wajar. Karena laporan saya kepada pemilik tidak diperhatikan, maka saya memilih keluar mencari pekerjaan lain.”

Sekelompok remaja mengaku bisa menyewa homestay untuk pesta seks. Mereka mencari homestay yang ditawarkan melalui internet. Homestay dipilih karena tidak mudah ketahuan oleh teman atau keluarga. Jika homestay dirasa nyaman, mereka biasanya akan menyewa lagi dengan perempuan remaja yang sama atau kadang juga berbeda. Homestay dengan harga murah kadang disewa oleh kelompok geng motor yang mengadakan taruhan dengan hadiah perempuan remaja yang memberikan layanan seksual. Kontak mereka dilakukan melalui media sosial dan imbalan dapat ditransfer melalui berbagai fasilitas modern (Humsona dkk, 2020).

Ketika prostitusi dapat diakses secara *online*, hampir semua media sosial dapat digunakan untuk melangsungkan praktik prostitusi. Prostitusi *online* telah merambah di berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak. Seorang konsumen menuturkan:

“Ada banyak cara transaksi. Selain membayar secara cash bisa transfer dengan ATM atau M banking. Biasanya ada DP untuk perantaranya, tetapi kalau langsung ke perempuannya tidak perlu DP. Kita bayar setelah selesai. Selain kesepakatan harga untuk servis, juga penentuan harga untuk tempat, dan pembayaran promosi. Perempuan yang sudah pengalaman bisa menentukan semuanya”.

Pengalaman tidak ditentukan oleh faktor umur saja, tetapi juga penguasaan teknologi, keberanian, dan penampilan fisik. Semakin banyak kesempatan yang dimiliki maka semakin berani untuk menentukan.

## Pembahasan

### Prostitusi Konvensional

Prostitusi tidak bisa lepas dari relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan atau isu gender. Selama ini, faktor keterbatasan ekonomi dipercaya sebagai faktor utama yang mendorong seorang perempuan menerjuni dunia prostitusi (Kartono dalam Patnani, 1999). Namun, Truong (dalam Suryandaru, 2001) menyatakan proses keterlibatan perempuan ke dalam praktek prostitusi ternyata tidak semata-mata didorong faktor kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Di luar muatan ekonomi yang ada, prostitusi sesungguhnya adalah ekspresi dari hegemoni kultural laki-laki atas perempuan atau ada relasi yang timpang dalam prostitusi. Suryandaru lebih lanjut menyatakan bahwa prostitusi tidak bisa lepas dari konstruksi sosial patriarkis yang menjadi dasar dominasi laki-laki terhadap perempuan di semua aspek kehidupan, termasuk pengendalian terhadap seksualitas perempuan. Institusi sosial dimana berlaku pengendalian seksualitas perempuan adalah keluarga dan prostitusi.

Relasi gender dan seksualitas adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan dalam memahami problem prostitusi. Karena itu penting untuk diketahui arti dan keterkaitan antara gender dan seksualitas. Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin (*sex*). Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural (Demartoto, 2013). Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri. Dari dimensi sosial, seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat (PKBI, 2014).

Weeks (1997) mengartikan seksualitas sebagai konstruksi historis yang menyatukan berbagai aspek biologis maupun mental – identitas gender, perbedaan tubuh, kapasitas reproduksi, kebutuhan, hasrat dan fantasi. Vance (dalam Weeks, 1997) berpendapat bahwa seksualitas dipahami, dialami dan dipraktikkan secara berbeda menurut umur, kelas, etnisitas, kemampuan fisik, preferensi dan orientasi seksual, agama dan tempat (region).

Pandangan yang sama dikemukakan Mottier (2008) yang menyebut seksualitas sebagai obyek budaya. Seperti halnya gender, seksualitas dimaknai berbeda menurut masyarakat dan periode waktu. Seksualitas dibentuk oleh kekuatan sosial dan politik dan berkaitan erat dengan relasi kuasa di dalam kelas, ras dan utamanya relasi gender.

Di dalam ajaran agama, seksualitas adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. terutama terkait dengan proses reproduksi. Seksualitas adalah domestic area, area sangat privat, di ranah keluarga dan antara suami dan isteri.

Prostitusi adalah seksualitas yang menyimpang dari norma sosial dan agama. Dalam prostitusi, hubungan seksual yang sakral dijadikan komoditi dan dimanfaatkan selain untuk kepentingan ekonomis juga untuk memenuhi hasrat seksual laki-laki. Yatim dan Lola Wagner (dalam Suryandaru, 2001) memaparkan relasi gender yang timpang dalam prostitusi bisa diamati dari temuan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa bagi laki-laki yang belum mempunyai pasangan resmi atau tetap, keberadaan pelacur adalah sarana mempelajari gaya dan permainan seksual yang dilihat dan dibayangkan. Namun, bagi laki-laki yang mempunyai pasangan resmi maupun tetap, keberadaan pelacur dimanfaatkan sebagai sarana mempraktekkan tindakan seksual yang selama ini tidak diperoleh dari pasangan resminya. Temuan ini membuktikan bahwa tindakan seksual antara laki-laki dan perempuan tidaklah egaliter, baik di lingkup relasi seksual legal di lingkup rumah tangga maupun relasi seksual ilegal atau prostitusi.

## **Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas dalam Prostitusi: Perspektif Feminisme Barat dan Feminisme Postkolonial**

Feminisme postkolonial merupakan gerakan feminis yang mengkritik feminisme Barat, yang memandang semua perempuan di berbagai dunia menghadapi kondisi ketertindasan yang sifatnya universal. Dasar pandangan Feminis postkolonial berakar pada penolakan universalitas pengalaman perempuan.

Pengalaman perempuan yang hidup di negara dunia ketiga sebagai negara koloni atau bekas koloni berbeda dengan perempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain mengalami penindasan berbasis penindasan berbasis gender, mereka juga mengalami penindasan antarbangsa, suku, ras, dan agama. Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme postkolonial yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas masyarakat. Beverley Lindsay dalam bukunya *Comparative Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, and Class* menyatakan, “hubungan ketergantungan yang didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan.”

Salah satu pelopor pemikiran feminis postkolonial adalah Candra Talpade Mohanty dengan karyanya yang terkenal “*Under Western Eyes*” (2003). Dalam “*Under Western Eyes*”, Mohanty mengkritik perspektif dan pandangan homogen dalam beberapa teks feminis Barat tentang perempuan di dunia ketiga. Menurut Mohanty, para penulis ini memposisikan “perempuan Dunia Ketiga” sebagai kelompok perempuan “Lain”. Perempuan di negara-negara Dunia Ketiga dilabeli sebagai “miskin, tidak berpendidikan, terikat tradisi, dan menjadi korban”. Mohanty mengkritisi gagasan yang mengkategorikan perempuan non-Barat tanpa mempertimbangkan konteks kelas, etnis, dan ras di mana mereka berasal.

Melalui berbagai kasus yang diungkap di “*Under Western Eyes*”, Mohanty berupaya untuk mengontekstualisasikan kompleksitas perempuan di dunia non-Barat, khususnya praktik-praktik budaya yang di mata feminis Barat dipandang sebagai menindas.

*Under Western Eyes*, menurut Schech dan Higgs (2000) mengungkap gagasan etnosentris Barat yang mengabaikan keragaman di antara perempuan dan mengelompokkan mereka dengan satu identitas universal — yaitu korban sistem

budaya patriarkis. Etnosentris akan mengarah pada wacana "perbedaan oposisi dikotomis yang menyiratkan hubungan superioritas dan inferioritas" dan mengelompokkan perempuan ke dalam dua kelompok yang berlawanan: "Perempuan Barat", yang secara universal dibebaskan, menikmati kesetaraan, memiliki kendali atas tubuh dan seksualitas mereka sendiri, yang juga superior, cerdas, dan berpendidikan, vis-à-vis kelompok yang dikategorikan sebagai

"Perempuan Dunia Ketiga, "yang secara universal tidak berpendidikan, menjadi korban kekerasan, dan karenanya membutuhkan semacam pertolongan atau penyelamatan.

Karena itulah, Ethel Crawley dalam bukunya "*Third World Women and The Inadequacies of Western Feminism*" (1991), menyatakan perempuan di negara berkembang sering menemukan model feminis barat tidak cocok untuk mereka. Perlawanan halus dan lunak terhadap penindasan bisa lebih efektif dan lebih banyak membangun solidaritas daripada tantangan dan konfrontasi langsung, terutama di ranah yang didominasi pria. Kaum feminis harus berusaha untuk tidak memaksakan norma-norma Barat yang kaku pada kelompok-kelompok etnis lain tetapi memberi mereka kebebasan untuk menyusun strategi perlawanan mereka sendiri.

Dalam konsep Foucault, "power" bekerja terkait dengan sistem kontrol. Dalam masyarakat kapitalis, kontrol tidak semata-mata sesuatu yang diterapkan dari luar diri seseorang atau suatu entitas, melainkan sistem kontrol itu berjalan atau bekerja pada diri individu, dengan melakukan kontrol melalui mekanisme "self-monitor" dan "selfdiscipline" dengan menegaskan norma-norma dan menaturalkannya sedemikian rupa sehingga seseorang akan merasa berkewajiban untuk menaati norma tersebut agar "bisa diterima" dan mendapatkan keberhasilan. "Self-regulation" seperti ini melibatkan sistem disiplin "gratification-punishment." Foucault (1995: 181) menyatakan bahwa, tindakan disiplin ini memberikan ganjaran dan hadiah sehingga memungkinkan seseorang mencapai tingkatan dan posisi yang

lebih tinggi. Sebaliknya sistem ini juga memberikan hukuman dengan proses yang sebaliknya.

Norma-norma ini terkait dengan konsep-konsep kultural mengenai tubuh di mana tubuh yang ideal dibayangkan sebagai tubuh yang secara sempurna menyesuaikan diri dengan norma-norma dan sebaliknya tubuh yang “melampaui batas” (transgressive) merupakan tubuh yang “borderless” dan menolak untuk tunduk pada norma-norma (Bordo, 1993:250). Tubuh, dalam pengertian Foucault terperangkap, “power nexus”, dan beredar dalam formasi diskursif yang membentuk tubuh sebagai “legible, docile, raced, sexed, dan gendered”. Maksudnya ketika membicarakan tubuh tidak semata persoalan figure yang berdaging dan berbentuk tertentu, melainkan sebagai suatu entitas yang terkait dengan “kuasa” atau “power” sehingga membicarakan tubuh akan terkait dengan tubuh sebagai entitas yang “sah atau tidak sah, taat atau tidak taat, yang dilihat ras-nya, yang dilihat gendernya”.

Bagi feminis postkolonialis, perempuan bukan sekadar menggunakan tubuhnya untuk bertahan hidup dan eksis dalam masa-masa sulit. Sebagai perempuan, ia menggunakan sekaligus menegosiasikan ‘agensinya’ (yakni, kemampuan manusia untuk bertindak yang kemampuan ini dimediasi secara sosiokultural) untuk membangun identitas dirinya sebagai perempuan (Rahayu, 2017).

Digitalisasi industri prostitusi telah merubah relasi gender dan seksualitas yang dibangun oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Perubahan relasi gender dan seksualitas tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui reproduksi terus menerus dari para aktornya. Dinamika relasi khususnya antara pelacur dan pengguna dapat dipahami melalui teori feminisme Barat dan feminisme postkolonial. Kedua teori ini dapat dimanfaatkan untuk melihat aspek yang berbeda. Teori feminisme postkolonial untuk melihat perilaku pelacur dalam memproduksi, sementara teori feminisme Barat untuk melihat relasi pelacur dalam konsumsi.

Feminisme Barat memandang semua perempuan di berbagai dunia menghadapi kondisi ketertindasan yang sifatnya universal. Perempuan dipersepsikan sebagai korban dari bentuk-bentuk penindasan laki-laki baik secara langsung maupun tidak kentara. Praktik prostitusi dianggap oleh



feminis radikal (Barat) memperkuat dan melanggengkan iklim penindasan ini. Feminisme radikal menentang prostitusi dengan alasan bahwa prostitusi merendahkan perempuan dan

menguatkan politik kekuasaan gender laki-laki. Prostitusi dipahami timbul karena kurangnya pemahaman tentang konsep etika seperti kebajikan, moralitas, dan degradasi. Cara pandang ini cenderung mendefinisikan apa itu pelacur menggunakan gagasan yang terlalu diverbalisasi, digeneralisasi, dan terlalu sering menggunakan gagasan stereotip (Bromberg, 1997).

Pandangan Feminis postkolonial seperti Crawley (1991), menyatakan perempuan di negara berkembang sering melakukan perlawanan halus dan lunak terhadap penindasan yang bisa lebih efektif dan lebih banyak membangun solidaritas daripada tantangan dan konfrontasi langsung, terutama di ranah yang didominasi pria. Kapur (2001) menggambarkan perlawanan penari bar yang juga melayani jasa seksual di India. Penjual jasa seksual (*sex workers*) menentang representasi hina dari subjek subaltern seksual, terutama di Dunia Ketiga, yang digambarkan sebagai buta huruf, dieksploitasi secara ekonomi, disalahgunakan, dan menjadi korban. Mereka menegosiasikan seks, budaya, pasar, dan keluarga melalui politik hasrat (*politics of desire*) yaitu keinginan untuk menghasilkan uang, hasrat untuk tampil, hasrat untuk menantang jurang sosial yang memisahkan pelacur dan klien mereka dari pria keluarga yang terhormat. Pekerja seks di dunia pasca-kolonial memunculkan subjek yang semakin melayani pasar, hasil trafficking seksual diekspor untuk pembangunan nasional dan perdagangan internasional. Konstruksi pekerja seks sebagai pelacur atau budak seksual inilah yang mendominasi respons kebijakan dan hukum baik di tingkat internasional maupun domestik.

Perkembangan modus prostitusi dari model konvensional di rumah bordil yang terlokalisasi dengan transaksi bagi hasil lewat perantara (*germo*) berkembang menjadi prostitusi online yang melibatkan jaringan banyak aktor dengan berbagai macam bentuk operasional yang semakin sulit terdeteksi. Internet telah secara eksponensial meningkatkan kemampuan pekerja seks untuk: (a) menjangkau sejumlah besar calon klien dengan iklan informatif, (b) membangun reputasi untuk layanan berkualitas tinggi, dan

(c) menggunakan metode penyaringan untuk mengurangi risiko penemuan dan menghindari klien yang tidak diinginkan (Cunningham dan Kendall, 2011). Temuan Sparks (2019) menunjukkan bahwa pelacur online meraup lebih banyak uang untuk layanan mereka dan juga menunjukkan gaya hidup yang lebih bersih dan lebih halus.

Teori feminisme postkolonial dapat digunakan untuk memahami perubahan relasi dalam produksi misalnya pelacur yang melakukan perlawanan terhadap penindasan baik dari pengguna maupun geromo dan calo. Pelacur berani mengajak pengguna yang sebenarnya ingin berhenti. Pelacur berani menggoda dengan menghubungi lebih dahulu. Pada era digital, hal ini mudah dilakukan melalui fasilitas media sosial.

Pelacur yang sudah berpengalaman juga bisa memilih pengguna yang akan dikontak. Mereka memilih pengguna yang berduit. Pelacur juga ada yang berani untuk menentukan tempat *speak* (kencan) dan besarnya imbalan sebelum bertemu fisik. Biasanya mereka memilih tempat yang pernah digunakan, jadi tahu tingkat harga, kenyamanan dan kerahasiaannya. Sementara untuk kesepakatan makanan, minuman dan rokok, akan disepakati setelah mereka bertemu.

Pelacur yang sudah tahu resiko berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan biasanya akan meminta pengguna untuk memanfaatkan kondom sebagai alat pengaman. Pelacur tahu tentang cara mengatasi agar tidak tertular dari teman yang semula mengajaknya masuk prostitusi. Ia mengaku beli di apotek. Kalau gejalanya sudah hilang biasanya ia tidak minum antibiotik lagi.

Perubahan relasi seksualitas juga nampak dari keberanian untuk sebisa mungkin memilih pengguna yang tampan dan bersih. Kalau yang didapat kurang tampan, maka lebih senang kalau ternyata tidak rewel dan cepat menyelesaikan aktivitas seksualnya. Jadi di sini pengguna maupun pelacur memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pasangan seksual yang disukai. Pelacur yang sudah beranjak dewasa ada yang pernah menjadi hadiah dalam suatu kompetisi geng motor.

Ranah praktek penjual jasa seksual disebut sebagai ruang lain atau "*third space*" oleh Homi K. Bhabha yaitu ruang di mana tertindas dan penindas dapat bersatu, bebas (mungkin hanya sesaat) dari penindasan itu

sendiri. Di ruang prostitusi yang dikonstruksikan sebagai ruang hina di masyarakat, pekerja jasa seksual memiliki kuasa atau tubuhnya sendiri dan mampu bertransaksi sesuai kualitas jasa yang ditawarkan (Silviana, 2014; Bhandari, 2022).

Pelacur yang beranjak dewasa dan masih berada di pusaran prostitusi, bisa terlibat dalam pesta seks di rumah kontrakan dengan beberapa kamar. Mereka juga bisa memilih kelompok yang diminati. Tidak saja mereka dicari, tetapi bahkan berani mencari dan menghubungi kelompok pengguna. Mereka biasanya mengajak teman 2 sampai 3 orang. Mereka ikut bergabung di akhir pekan, dan berada di sana sampai pagi hari. Untuk keperluan makan dan minum dijamin oleh kelompok pengguna. Bila mereka merasa nyaman dan cocok maka akan berlanjut di minggu-minggu selanjutnya. Menurut pengguna, barangkali pemilik rumah kontrakan tahu aktivitas mereka, tetapi tidak pernah menegur. Yang penting kewajiban pembayaran lancar, maka tidak ada masalah (Humsona dan Yuliani, 2016).

Adapun teori feminisme Barat dapat digunakan untuk memahami relasi pelacur dalam konsumsi. Pada pelacur yang sudah beberapa tahun berada di pusaran prostitusi, mulai merasakan adanya tuntutan gaya hidup. Keinginan mendapatkan uang untuk memenuhi gaya hidup mendorong untuk terus menjalin relasi seksual komersial. Motif yang semula untuk tujuan ekonomi mengatasi kemiskinan telah bergeser.

Ketidakmampuan pelacur keluar dari prostitusi karena tuntutan untuk memenuhi gaya hidup menunjukkan pandangan Teori feminime Barat bahwa semua perempuan di berbagai dunia menghadapi kondisi ketertindasan yang sifatnya universal.

Ketertindasan dalam konsumsi ini sulit ditinggalkan karena adanya motif konsumsi merupakan manipulasi untuk penentuan status sosial yang membedakan dalam kelompok dan kelasnya tanda kekuasaan, prestise, bobot dalam distribusi nilai status. Maka soal selera bukan selera yang netral dalam rumusan ekonomi tetapi lebih kepada hasil pendidikan dan pembiasaan. Pelacur yang sudah terbiasa hidup mudah terbelenggu oleh gaya hidup yang selama ini dirasa lebih menyenangkan.

## KESIMPULAN

Prostitusi merupakan industri yang terus tumbuh dan berkembang. Digitalisasi industri prostitusi telah merubah relasi gender dan seksualitas yang dibangun oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Digitalisasi menopang eksistensi prostitusi bersamaan dengan banyaknya lokalisasi yang ditutup. Digitalisasi menumbuhkan delokalisasi prostitusi. Teori feminisme Barat dan feminisme Postkolonial dapat dimanfaatkan untuk mengkaji perubahan relasi gender dan seksualitas dalam prostitusi.

Dari pembahasan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perubahan relasi gender dan seksualitas dalam prostitusi nampak dari kemampuan perempuan untuk mengendalikan relasi dengan laki-laki dalam produksi (memperoleh pendapatan) yang dapat dipahami dengan teori feminisme barat. Sedang ketidakmampuan perempuan nampak dalam relasi berkonsumsi (mengalokasikan pendapatan) yang dapat dipahami dengan teori feminisme Postkolonial. Oleh karena itu teori feminisme Barat dan feminisme Postkolonial tidak perlu dipertentangkan melainkan dimanfaatkan sesuai dengan aspek perubahan relasi gender dan seksualitas dalam prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bhabha and Homi, K. 1994. "The Location of Culture. Routledge." New York.
- Bhandari, Nagendra Bahadur. 2022. "Homi K. Bhabha's Third Space Theory and Cultural Identity Today: A Critical Review." *Prithvi Academic Journal*, Volume 5, May 2022 [pp. 171-181].
- Bromberg, S. 1997. "Feminist Issues In Prostitution." International Conference on Prostitution at Cal State University, Northridge.
- Cunningham, Scott dan Kendall, Todd D. 2011. "Prostitution 2.0: The changing face of sex work." *Journal of Urban Economics* 69 (2011) 273–287.
- Demartoto, A. 2013. "Seks, Gender, Seksualitas Gay dan Lesbian."
- Crowley, E. 1991. "Third World Women and the Inadequacies of Western Feminis." Dublin: Trocaire Development Review.
- Efendi, Z & Apriliani, D. E. 2021." Analisis Komunikasi pada Aplikasi MiChat sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak." Panangaran: *Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 4(2), 86–107.

- Fakih, M. 1998. "Pengembangan Masyarakat dengan Perspektif Gender." Bina Swadaya (Bulletin) No.12 Tahun VI.
- Flora, Henny Saida. 2022. "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi melalui Media Sosial Online." *Journal Justiciabellen (JJ)*. Vol. 02 (02), Juli.
- Heyl, TH., Endang, S and Gavin WJ. 1979. "Pelacuran di Indonesia. Sejarah dan Perkembangannya." Jakarta: Sinar Harapan.
- Humsona, R. 2010. "Trafiking: Jaringan Prostitusi Anak di Solo." Yogyakarta: Almaterra Publishing.
- Humsona, R, Wijaya M., Leibo, J dan Yuliani, S. 2016. "Jaringan Prostitusi Anak di Kota Surakarta: Kajian tentang Pengguna." *Proceeding Seminar Nasional UMS*.
- Humsona, R, Yuliani, S and Pranawa, S. 2020. "Delocalization of Adolescent Prostitution in Digital Era: Indonesia's Challenge to Bring SDGs into Reality." *Proceeding Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable Development*. Purwokerto: Unsoed.
- Irlanie, CC. 2016. "Feminisme dan Prostitusi. Kolom Feminisme dan Prostitusi." <https://geotimes.co.id/kolom/feminisme-dan-prostitusi/>
- Irwanto. 2006. "Focused Group Discussion." Jakarta: Buku Obor.
- Kapur, R. 2001. "Post-Colonial Economies of Desire: Legal Representations of the Sexual Subaltern." *Denver Law Review*. Rev. 855.
- Kartika, Unoviana. 2015. "Prostitusi "High Class, Artis Kelas A Bertarif "Unlimited.".
- Mohanty, CT. 2003. "Under Western Eyes, Revised : Feminist Solidarity Through Anticapitalist Struggles." *Chicago Journal*. Vol 28 (2).
- Mottier, Véronique. 2008. "Sexuality: A Very Short Introduction." New York: Oxford University Press Inc.
- Nanik, S., Kamto, S., Yuliati, Y. 2012. "Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme." *Wacana – Vol. 15 (4)*.
- Patnani, M. 1999. "Prostitusi: Antara Pilihan dan Keterpaksaan." *KOGNISI. Majalah Ilmiah Psikologi*. Vol.3 (2).
- Puspita, Y. 2015. "Pemanfaatan New Media dalam Memudahkan Komunikasi dan Transaksi Pelacur Gay." *Jurnal Pekommas*, 18(3), 203–212.
- Rahayu, M. 2010. "Gender Seksualitas Postkolonial dalam Novel Eka Kurniawan *Cantik Itu Luka*," *Prosiding Senasbasa*.
- Royani, A & Ningtias, A. D. 2021. "Uji Konteks terhadap Penerapan Teknik Undercover Buy dalam Prostitusi Online dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 132–148.
- Schech, S and Jane H. 2000. "Culture and Development A Critical Introduction." South Australia: Blackwell Publishers.

- Schulze, E., Canto, SIN., Mason, P and Skalin, Maria. 2014. “*Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality.*” European Parliament. Policy Department C : Citizens’ Rights and Constitutional Affairs.
- Silviana, I. 2014. “Kuasa Perempuan Penjaja Seks (Kajian Kritis Etnografi Feminis terhadap Relasi Kuasa Perempuan Penjaja Seks di Madiun).”
- Sparks, E. P., Marcum, C. D., Clevenger, S. L., & Sedlacek, J. 2019. “Comparison of Financial Lucrativeness and Safety in the World of Online and Offline Prostitution: An Exploratory Study of Perceptions and Experiences of Law Enforcement.” *American Journal of Criminal Justice*. Springer.
- Suryandaru, Yayan S. 2001. “Hegemoni dan Reproduksi Kekuasaan dalam Perdagangan Perempuan (Trafficking) untuk Prostitusi.” *Manusia, Kebudayaan, dan Politik*. Th XIV (2) April.
- Tamarol, A. A. 2019. “Proses Hukum terhadap Pelaku yang Terlibat Prostitusi Online Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia.” *Lex Et Societatis* Vol. VII (7), 69–76.
- Wahab, Z. A, Kurnaesih, E, & Multazam, A. 2020. “Prostitusi Pada Mahasiswi melalui Layanan Media Online di Kota Makassar Tahun 2020.” *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 1(1), 9–18.
- Weeks, J. 1997. “*Sexuality.*” New York: Routledge.